

RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGSURSARI TAHUN 2024



**PEMERINTAH KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungursari Tahun 2023 ini dapat disusun.

Dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dikemukakan bahwa Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya

Kecamatan Bumgursari sebagai koordinator kegiatan Pemberdayaan masyarakat tingkat bawah dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Rencana Kerja (Renja) juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Disamping itu Rencana Kerja (Renja)) ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat Kami perlukan. Atas kerjasamanya dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan terima kasih. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungursari Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Bungursari, Januari 2024

Camat Bungursari



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023.....	9
	2.1 Evaluasi Kinerja Program Kerja Perangkat Daerah Per triwulan Tahun 2023.....	10
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
	3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.....	16
BAB IV	PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Bungursari yang telah berjalan dapat diketahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja perubahan OPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana kerja perubahan OPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu OPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Bungursari dimulai dengan menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Bungursari untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan OPD tahun lalu serta mengacu kepada Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD menggunakan adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD
- c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya, maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai akhir tahun 2024 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Bungursari adalah :

1. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 518 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 10) ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembanguann Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,dan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 , tambahan Lembaran Daerah Nomor 236):
12. Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 237):
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)Kabupaten

- Purwakarta Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 185 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.264 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
 22. Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
 23. Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungursari tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perencanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun ke depan, dengan maksud untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan resmi bagi komponen pemerintah dan masyarakat sesuai dengan isi Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis sekaligus pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Pemerintah dan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungursari tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai pedoman /tolok ukur dan dokumen dalam menentukan perencanaan yang strategis di tingkat Kecamatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bungursari.
- c. Untuk dijadikan dasar tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungursari

- **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Triwulan II)

- **Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan Rencana Kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik

- **Bab. IV Penutup.**

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

OPD Kecamatan Bungursari telah mengevaluasi Kinerja tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2024 anggaran 2024 mempunyai 6 Program dan 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024 Kecamatan Bungursari telah mengevaluasi 6 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ;
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Bungursari yang mengacu pada hasil laporan kinerjatahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut:

**EVALUASI KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2023
KECAMATAN BUNGURSARI**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (PARSIAL I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (S/D TRIWULAN II)	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
7					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
7	01				KECAMATAN				3.140.583.078,00	1.000.207.226		3.836.613.041	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.036.758.205	2.853.313.041		6.502.018.479	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.918.067	25%	2.999.956	55%	5.999.844
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Rencana Kerja Yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	4.918.223		-		-
7	01	01	2.01	02	Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun			2.999.956	100%	2.999.956	100%	2.999.956
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	2.999.888			100%	2.999.888
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.462.054.255	18%	447.269.901	29%	710.472.107

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Persen	Persen	2.459.054.313	18%	447.269.901	29%	707.472.165
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Dokumen	Dokumen	2.999.942			100%	2.999.942
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah				2.999.910	100%		100%	2.999.910
7	01	01	2.03	05	Rekonsialisasi dan Penyusunan Barang Milik daerah	Jumlah dokumen penyusunan barang milik daerah yang disusun	Unit	10 Unit	2.999.910		-	100%	2.999.910
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.984.073	25%		25%	46.059.822
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Item	Item	14.998.804	13%	1.978.818	34%	5.126.164
h7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang milik daerah yang disediakan			74.090.503				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persen	12 Bulan	14.916.443	13%	1.984.798	45%	6.748.565
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dan jumlah pemenuhan makanan dan minuman yang disediakan	Persen	12 Bulan	43.827.574	6%	2.466.848	35%	15.512.287
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persen	Item	10.470.749	13%	1.410.516	49%	5.082.806
7	01	01		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah SKPD yang dilaksanakan	Persen	OH	26.680.000	51%	-	51%	13.590.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		298.958.900	63%	77.379.608	63%	187.165.367
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah merai yang dibeli/disediakan	Persen	Lembar	3.000.000	25%	750.000	50%	1.500.000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, dan internet yangdibayar	Persen	Bulan	37.112.900	7%	1.410.516	35%	12.927.453
7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah dan lama waktu alat sound system yang disewa	Persen	Item	6.000.000		-		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan pegawai non PNS	Persen	Orang	252.846.000	29%	74.070.638	68%	172.737.914
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		76.843.000	18%		18%	14.200.518
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas		Persen	25.985.000			13%	3.300.118
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Persen	Persen	12.940.000	7%	850.000	32%	4.175.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor			37.918.000			18%	6.725.400
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.987.705	70%	-	70%	20.899.908
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan				29.987.705	70%		70%	20.899.908
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan			14.999.908	100%	14.999.908	100%	14.999.908
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti di tingkat Kecamatan	Persen	Persen	14.987.797		-	39%	5.900.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.973.815		983.300.000	18%	2.512.125.409
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1.973.815				
7	01	03	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan UMKM di tingkat Kecamatan	Persen	Persen	1.973.815		-		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.600.000		-	25%	2.400.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum				9.600.000	18%		25%	2.400.000

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan	Persen	Persen	9.600.000	-	25%	2.400.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.610.000	18%	-	-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.610.000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memntapkan pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bungursari	Persen	Persen	25.610.000	-	-	-
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				36.653.353	-	27%	10.009.750
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				36.653.353			10.009.750
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kinerja desa dan pembinaan administrasi Keuangan desa			11.666.281			
	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa	Kegiatan	1 Kegiatan	24.987.072	-	40%	10.009.750

1. Faktor – faktor kegiatan dan program masih ditemukan kendala salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja Kecamatan Bungursari sebagai sarana pendukung pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif
2. Target dan realisasi tidak akan sama dengan target yang telah di rencanakan (Renja)
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta mewujudkan visi organisasi.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024- 2026 untuk Kecamatan berisi Misi yaitu:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”

Dan di lengkapi dengan tujuan serta isi misi tersebut adalah :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif
- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang bersih profesional dan berintegritas.

Untuk mendukung keduanya ,maka prioritas pembangunan dan perubahanrencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif perubahan dituangkan dalam tabel matriks berikut :

**MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
KECAMATAN BUNGURSARI TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS / SUMBER DATA	PAGU ANGGARAN
						2024
9	10	11	12	13	15	21
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						3.123.466.067
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	
Kegiatan : Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.365.550
			Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran , dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Di Susun	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran , dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Di Susun	
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Domunen RKA SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Domunen RKA SKPD	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						3.527.050
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						3.000.000
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
Subkegiatan : Koordinasidan dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD						3.000.000
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.838.500
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.462.679.730
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN,Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun	Orang/bulan laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN,Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun	
			Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.457.823.970
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun			4.855.760
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000
			Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan yang dibutuhkan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan yang dibutuhkan	
			SubKegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			20.000.000
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
			Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			25.000.000
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			5.000.000
			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di susun	Laporan	Jumlah lapotanAdministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di susun	
			Subkegiatan : Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			5.000.000
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.847.315
			Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Paket Laporan Dokumen	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.669.500
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000
			jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.177.815
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
		Subkegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.000.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Lapran Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	
		SubKegiatan:	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan			20.000.000
			Jumlah unit kendaraan perorangan dinas aoprasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas , Jabatan yang disediakan	

	Kegiatan :	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				351.573.472
			Jumlah penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	Laporan	Jumlah penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	
		Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
		Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				311.573.472
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000
			Jumlah penyediaan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibutuhkan	Unit	Jumlah penyediaan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibutuhkan	
		Subkegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan			20.000.000
			Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibavark n	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibavark n	
		Subkegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Subkegiatan :	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya			45.000.000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						20.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
	Kegiatan :	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000
			jumlah Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan	Laporan	jumlah Kegiatan Musrebnag tingkat Kecamatan	
		Subkegiatan :	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			20.000.000
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						40.000.000
			Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan x 100% Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum keseluruhan	
	Kegiatan :	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				40.000.000
			Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		
		Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, P				40.000.000
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.000.000
			Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan x 100% Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa keseluruhan	
	Kegiatan :	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah			Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	26.000.000
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	Kegiatan		
		Subkegiatan :	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.000.000
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	
		Subkegiatan :	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
		Subkegiatan:	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			20.000.000
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	
						17.000.000
			Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan	
						17.000.000
			Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan	

Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						17.000.000
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan x 100 % Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat keseluruhan	
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						6.000.000
			Jumlah Kegiatan koordinasi Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	
		Subkegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.000.000
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	
Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						11.000.000
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan	Laporan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan	
		Subkegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				5.500.000
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
		Subkegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing				5.500.000
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						10.000.000
			Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh kejadian konflik sosial}} \times 100 =$	
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
			Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Laporan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	10.000.000
		Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.000.000
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Subkegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di wlayah Kecamatan				5.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

BAB. IV PENUTUP


Rencana Kerja Kecamatan Bungursari tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Dalam rangka mencapai target diharapkan mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kecamatan Bungursari, diikuti dengan upaya upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pencapaiannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bungursari 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, Januari 2024
CAMAT BUNGURSARI



Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si
NIP. 19671020 199303 1 009